

REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN MENUJU INDONESIA BARU

Azril Azahari *

Abstrak: Kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, diharapkan dapat mengantisipasi keadaan persaingan global yang semakin ketat. Berbagai tantangan yang perlu dihadapi muncul secara kompleks karena pendidikan adalah suatu investasi jangka panjang. Pendidikan tidak mampu menghasilkan dan berdampak seketika (quick yielding/instant). Oleh karena itu, perlu suatu antisipasi masa depan, dan industrialisasi pendidikan tinggi di Indonesia mendapat tempat dan menjadi momentum guna menghadapi era globalisasi. Industrialisasi dalam pendidikan tinggi dapat bermakna suatu proses mengubah dan mengembangkan pendidikan tinggi ke dalam suatu industri. Industrialisasi pendidikan tinggi telah terlaksana dan jauh berkembang di negara industri. Hal itu ditunjukkan antara lain dengan berkembangnya perguruan tinggi swasta sebagai suatu private corporation in perpetuity, memperhatikan kebutuhan pasar kerja (market-driven), diversifikasi sumber pendapatan, maupun managerial philosophy of private corporations. Industrialisasi pendidikan tinggi di Indonesia yang disarankan adalah:

internasionalisasi pendidikan tinggi, pendidikan berdasarkan kebutuhan pasar kerja, pendidikan terpadu, komersialisasi riset, keterampilan terjual, dan program kekhasan.

Kata kunci: era globalisasi, industrialisasi pendidikan tinggi, kebutuhan pasar kerja, diversifikasi sumber pendapatan.

1. Pendahuluan

Untuk menghadapi abad ke-21 dituntut suatu perubahan regulasi yang semula monopoli (*monopoly*) menjadi persaingan bebas (*free competition*). Demikian pula, terjadi perubahan pasar, yang pada awalnya berorientasi pada produk (*product oriented*) beralih pada orientasi pasar (*market driven*), serta dari proteksi (*protection*) berpindah menjadi pasar bebas (*free market*). Untuk itu, perlu antisipasi untuk mendayagunakan

* Dr. Azril Azahari adalah Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti

waktu yang tersisa ini dengan memperkuat kemampuan bersaing di berbagai bidang terutama di bidang tenaga kerja atau sumber daya manusia baik melalui peningkatan peranan maupun kualitas sumber daya manusia terutama melalui pendidikan.

Untuk mengantisipasi keadaan ini, sudah saatnya dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi mempunyai suatu visi khususnya visi 2020. Apakah kita telah mempunyai visi 2020 tersebut? Tentunya visi 2020 itu harus mengacu pada visi 2020 pembangunan secara keseluruhan. Apakah untuk menghadapi tahun 2020 tersebut kebijakan diarahkan untuk membangun Indonesia menjadi negara industri dengan meninjau dan menyusun kembali (*reform*) sektor pendidikan?

Kebijakan dalam pendidikan termasuk pendidikan tinggi diharapkan dapat mengantisipasi persaingan global yang semakin ketat, dengan tidak mengabaikan strategi pengembangan pendidikan terpadu dan dilandasi visi pendidikan tinggi yang mampu melihat keberlakuannya untuk masa yang jauh ke depan.

2. Tantangan

Pendidikan adalah suatu investasi jangka panjang. Pendidikan tidak mampu menghasilkan dan berdampak seketika (*quick yielding/instant*). Untuk itu, kita harus memperhatikan lebih dahulu bagaimana keadaan sumber daya manusianya. Penduduk usia kerja (BPS,1996) yang tidak bersekolah 9,2 persen dan SD ke bawah mempunyai porsi yang terbesar yaitu 69,4 persen, sedangkan diploma hanya mencapai 1,3 persen dan universitas 1,2 persen. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan penduduk usia kerja yang bekerja. Penduduk dewasa yang buta aksara (1990) sekitar 16 persen, sedangkan di beberapa negara Asia seperti Korea Selatan, Thailand, Filipina, Sri Lanka dan

Singapura sangat rendah berkisar antara 2 hingga 12 persen. Demikian pula kesempatan belajar di SLTP, SM, dan PT masih tertinggal dari negara lain. Angka partisipasi SLTP, SM dan PT yang kita capai saat ini adalah sama dengan yang telah dicapai oleh Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand pada 15-20 tahun yang lalu. Menurut UNDP, pada tahun 1994 *Human Development Index (HDI)* yaitu gabungan antara angka melek huruf, angka harapan hidup, dan pendapatan per kapita penduduk adalah sebesar 0,586 (peringkat 105). Nilai tersebut telah membaik pada tahun 1996 yaitu 0,641 (peringkat 102), namun masih tetap lebih rendah dari Thailand (52), Malaysia (53), dan Filipina (95). Pada tahun 1997 dengan nilai HDI 0,668 Indonesia berada pada peringkat 99. Pada tahun 1993 pembiayaan pendidikan hanya mencapai sekitar 3,5 persen dari GDP, sedangkan rata-rata di negara berkembang sekitar 3,7 persen dan di negara ASEAN 4,3 persen dari GDP. Anggaran Pendidikan Singapura tahun 1995 telah mencapai \$ 4 billion, sedangkan Indonesia dengan jumlah penduduk 200 juta lebih tahun 1997/1998 sekitar Rp.3.503,6 milyar (termasuk BLN). Pemerintah Singapura (1995) telah memberikan subsidi kepada setiap mahasiswa untuk tingkat *junior college* sebesar \$ 6.300, tingkat politeknik sebesar \$ 7.800 dan universitas sebesar \$ 17.200. Indonesia mengalokasikan biaya penelitian sekitar 0,25 persen dari GDP, sedangkan di negara industri baru telah mencapai rata-rata 1,6 persen dari GDP. Demikian pula dari keadaan tenaga kerja (BPS, 1993) tergambar bahwa untuk distribusi pekerja laki-laki adalah 33,47 persen (sektor formal) dan 66,53 persen (sektor informal), distribusi buruh/karyawan laki-laki yang berpenghasilan di bawah Rp.200.000,- sebanyak 90,85 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,58 persen menjadi 4,9 persen (1996) dan tingkat setengah pengangguran 38,66 persen menjadi 41,5 persen (1996). Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja sejak 1992 bergerak tidak jauh hingga 58,3 persen (1996).

Pendidikan di Indonesia, selama 20 tahun sejak tahun 1968 telah mengalami kemajuan. Kemajuan ini terlihat dengan adanya perubahan suatu indikasi kuantitatif yang disebut *angka partisipasi pendidikan* yaitu rasio antara jumlah siswa terhadap jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan yang bersangkutan. Namun, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara Philippina, Thailand, Singapura, Malaysia, atau Korea. (Lihat Tabel 1).

Selanjutnya, Arsyad (1990:8-9) mengungkapkan bahwa angkatan kerja yang berpendidikan tamat SD dan lebih rendah, menurun persentasenya dari 88,25 persen dalam tahun 1980 menjadi 78,43 persen pada tahun 1988. Bersamaan dengan ini angkatan kerja yang berpendidikan SLTP dan SLTA meningkat dari 10,92 persen dalam tahun 1980 menjadi 19,71 persen pada tahun 1988. Perkembangan angkatan kerja berpendidikan tinggi nampaknya lebih cepat yaitu dari 0,81 persen pada tahun 1980 menjadi 1,86 persen pada tahun 1988, atau meningkat lebih dari dua kali dalam kurun waktu delapan tahun. Namun demikian, tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia masih rendah, yaitu lebih dari 78 persen berpendidikan tamat SD dan lebih rendah (hampir 16 persen di antaranya atau hampir 12 juta tidak pernah sekolah, dan 27 persen atau lebih dari 20 juta tidak tamat SD pada tahun 1988). Selain itu, angkatan kerja berpendidikan menengah dan tinggi yang mencari kerja meningkat.

Tabel 1
Angka Partisipasi Jenjang Pendidikan Tinggi

Negara	1976/1977	1978/1979	1980/1981	1982/1983	1983/1984
Indonesia	--	2,6	--	4	5,3
Philippina	24	27	25	29	38
Thailand	5	13	20	22	20
Singapura	9	8	11	11	--
Malaysia	3	3	5	--	6
Korea	11	14	18	24	26

Sumber : Balitbang Depdikbud, 1990 (Arsyad, 1990)

Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, peranan pendidikan cukup menonjol. Dari pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa dalam menuju perubahan struktural, dengan meningkatnya pembangunan ekonomi telah terjadi proporsi tenaga kerja di bawah pendidikan dasar yang semakin mengecil, sedangkan proporsi tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi semakin meningkat. Berbeda dengan negara lain yang mengalami tinggal landas, proporsi yang berpendidikan dasar dan menengah di Korea pada pertengahan tahun 70-an cukup besar yaitu 19 persen tidak berpendidikan, 43 persen berpendidikan dasar, 31 persen berpendidikan menengah dan 7 persen berpendidikan tinggi (Macharany, 1990). Selanjutnya, Yudo Swasono dan Boediono (dalam Macharany, 1990) mengungkapkan bahwa struktur tenaga kerja Indonesia pada tahun 1985 adalah 53 persen tidak berpendidikan, 34 persen berpendidikan dasar, 11 persen berpendidikan menengah dan 2 persen berpendidikan tinggi. Bila kita ingin mencapai tinggal landas seperti Korea, diperkirakan struktur tenaga kerja menurut pendidikan dalam tiga skenario pertumbuhan GDP per kapita, yaitu rendah 6 persen, sedang 7 persen, dan tinggi 8 persen pada tahun 2019.

Tabel 2
Struktur Tenaga Kerja menurut Pendidikan
dalam Tiga Skenario Pertumbuhan GDP per Kapita

Tingkat Pendidikan	Skenario	Pertumbuhan		GDP perkapita Tinggi (8%)
	Rendah (6%)	Sedang (7%)		
1. Tidak berpendidikan (%)	15	11		8
2. Berpendidikan dasar (%)	50	52		52
3. Berpendidikan Menengah (%)	30	32		34
4. Berpendidikan Tinggi (%)	5	5		6
Jumlah (%)	100	100		100

Catatan : Pendapatan per kapita dipilih sebagai variabel yang menjelaskan struktur pendidikan tenaga kerja.

Jika dibandingkan dengan kenyataan yang ada, dengan skenario rendah dengan pendapatan per kapita 6 persen, maka untuk mendapatkan keadaan yang sama di Korea pada awal tinggal landas, Indonesia perlu melakukan upaya khusus. Upaya khusus tersebut di antaranya dengan menekan tenaga kerja yang tidak terdidik serta meningkatkan proporsi yang berpendidikan menengah ke atas.

Ada beberapa pokok pikiran yang perlu kita pertimbangkan, yang berasal dari Dewan Persaingan Dunia (*World Competitive's Council*) dan beberapa ahli filsafat. Mereka membahas pendidikan mulai dari teknologi sampai dengan seni sastra, dari teknologi tinggi sampai dengan arkeologi. Yang layak dikembangkan sebagai kompetensi dasar pada tiap-tiap jenjang pendidikan, yaitu:

1. kemampuan membaca;
2. kompetensi menulis;
3. kompetensi mendengar, hal ini sulit dilaksanakan karena seringkali orang hanya mendengar suaranya sendiri;

4. menurut, ini adalah satu kata dalam pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang seringkali agak rancu sekarang ini, sebagian sebagai dampak dari radio swasta;
5. menghitung;
6. mengamati atau melakukan observasi;
7. membayangkan, ini adalah visualisasi daya cipta dalam bidang sastra dan kebudayaan, dan
8. menghayati atau *empathy* pada orang-orang yang kurang beruntung.

3. Ke mana Arah Manajemen Pendidikan Tinggi Kita?

Industrialisasi dalam pendidikan tinggi dapat bermakna suatu proses mengubah dan mengembangkan pendidikan tinggi ke dalam suatu industri. Industrialisasi pendidikan tinggi telah terlaksana dan jauh berkembang di negara industri. Hal itu ditunjukkan antara lain dengan berkembangnya perguruan tinggi swasta sebagai suatu *private corporation in perpetuity*, memperhatikan kebutuhan pasar kerja (*market-driven*), diversifikasi sumber pendapatan, maupun *managerial philosophy of private corporations*.

Dengan berkembangnya era globalisasi tidak bisa dipungkiri akan munculnya berbagai *Multi-National Enterprise (MNE)*, dan hal itu akan merambah pula pada *Multi-National Higher Education Enterprise (MNHEE)*.

Untuk menghadapi antisipasi berbagai "isu" yang muncul dalam menghadapi abad ke-21 mendatang, sudah pada tempatnya kita mulai memperkirakan beberapa indikator sebagai berikut.

(1) Internasionalisasi Pendidikan Tinggi

Kita tidak bisa menghambat perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi di negara lain, maupun sebaliknya. Kita bisa memanfaatkan sumber daya ini menjadi suatu pusat perkembangan yang bersifat wilayah untuk pengembangan pendidikan tinggi (*Making Indonesia a regional center of higher education?*), sebelum didahului oleh negara lain.

Beberapa waktu yang lalu, banyak peserta didik perguruan tinggi negara jiran seperti Malaysia berdatangan ke Indonesia untuk menimba ilmunya di berbagai perguruan tinggi seperti di UI, IPB, dan UGM. Namun, dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaan telah berbalik, karena kini banyak orang Indonesia yang berdatangan ke negara lain untuk belajar. Diperkirakan mahasiswa kita yang belajar ke luar negeri telah mencapai 50.000 orang (sekitar 2 persen dari jumlah mahasiswa seluruhnya), yang telah mengeluarkan devisa sekitar Rp 2.300 milyar. Kalau gejala ini dibiarkan, yang akan mendapatkan manfaatnya tentu negara tetangga kita. Betapa gencarnya promosi yang dilakukan oleh perguruan tinggi Australia, Singapura, maupun Malaysia untuk menjaring calon mahasiswanya. Kita dapat memanfaatkan kondisi ini untuk memperkuat pendidikan tinggi dengan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi yang terkenal, sehingga segmen pasar yang sangat strategis ini masih dapat dikendalikan? Kenapa kita tidak menerima investasi/partisipasi negara lain dalam pendidikan tinggi sehingga membentuk suatu *a new partnership*? Peraturan kita telah membolehkan pihak asing menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Republik Indonesia dengan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia.

(2) Pendidikan Berdasarkan Kebutuhan Pasar Kerja (*Market-Driven Education*)

Sebagai salah satu wujud kebijakan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*), dunia pendidikan perlu mengubah orientasi dengan lebih memperhatikan kebutuhan pasar kerja (*market driven*). Pendidikan hendaknya terkait dengan kebutuhan tenaga kerja nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat diharapkan berkurangnya angka pengangguran intelek yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Dengan memperhatikan pada kebutuhan pasar kerja, maka profil lulusan akan berubah dengan perspektif baru yaitu lulusan yang berkualitas untuk bekerja, bukan hanya sekedar lulusan yang terampil. Untuk itu, pendidikan tinggi harus berorientasi pada pemecahan masalah (ilmiah, teknologi, sosio-kultural, dll.)

(3) Pendidikan Terpadu (*Unified System*)

Pendidikan Formal dan Nonformal. Kegiatan pendidikan formal dan nonformal perlu direncanakan secara terintegrasi sehingga mampu saling mendukung. Kegiatan pendidikan perlu dipraktikkan secara nyata melalui kegiatan *apprenticeship training* baik yang dilakukan pada unit bisnis/industri yang dirancang khusus oleh perguruan tinggi dalam bentuk *reality based education* seperti suatu *teaching hospital* atau bekerja sama dengan pihak bisnis/industri lain dalam bentuk *cooperative academic education*. **Keterpaduan Riset - Pengajaran - Business/Pelayanan.** Pengertian Tridharma Perguruan Tinggi harus diterjemahkan dan dilaksanakan secara utuh. Hasil riset di samping untuk aplikasi dari ilmu yang diajarkan serta pemecahan masalah di dunia bisnis/industri, juga harus merupakan bahan untuk memperkaya penjelasan yang disampaikan dan diajarkan dalam proses belajar-mengajar maupun untuk membuat bahan publikasi yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Untuk itu, perlu

dikembangkan konsep *reality based education (teaching hospital)*. yang dikelola secara langsung oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Kegiatan riset, pengajaran dan pelayanan/bisnis dilakukan secara terintegrasi dalam suatu kesatuan.

(4) Komersialisasi Riset

Sampai saat ini, perguruan tinggi masih banyak bergelimang pada penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Sudah saatnya perguruan tinggi mempunyai arah baru dan penekanan pada *university research* di samping sebagai *research university*. Perguruan tinggi perlu memikirkan sistem insentif, balas jasa (*reward*) dan infrastruktur yang lebih baik. Demikian pula perguruan tinggi dapat membentuk unit usaha, terutama untuk menempuh resiko dengan memulai komersialisasi produk riset. Dengan demikian, perguruan tinggi harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada guna kepentingan masyarakat, perguruan tinggi harus mampu memilih dan menawarkan riset apa saja yang bisa dijual kepada masyarakat (*saleable research*).

(5) Keterampilan Terjual (*Saleable Skill*)

Kerjasama Perguruan Tinggi dengan dunia bisnis/industri perlu ditingkatkan terutama dalam menawarkan jenis pelatihan dan konsultasi yang sangat diperlukan oleh dunia bisnis/industri (*saleable skill*). Perguruan tinggi perlu menghimpun sumber daya yang dimilikinya guna ditawarkan kepada masyarakat, seperti berbagai jenis konsultasi, mendirikan *Business Incubator Center (BIC)*, pelatihan dsb.

(6) Program Kekhasan/Spesifik

Untuk bisa memacu dan memasuki abad persaingan yang semakin ketat maka perlu diberikan suatu bentuk otonomi perguruan tinggi. Apakah pola tunggal pembinaan perguruan tinggi saat ini masih relevan? Sudah saatnya untuk bisa menangkap peluang yang ada, setiap perguruan tinggi perlu mengembangkan arah kekhasan perguruan tingginya. Tentunya pemilihan dan penentuan kekhasan dari perguruan tinggi tersebut harus berdasarkan pada sumber daya yang dimilikinya dan arah pengembangannya.

4. Kesimpulan

Industrialisasi pendidikan tinggi di Indonesia sudah saatnya mendapat tempat dan menjadi momentum untuk menghadapi era globalisasi. Jangan sampai kita terlambat mengantisipasinya. Hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih mantap.

Pustaka Acuan

- Agriculture Manpower Development Centre (1998). *"Monitoring Tenaga Kerja Pertanian. Ciawi-Bogor.*
- Arsyad, Sitanala (1990). *Tinjauan Kritis Tentang Kebijaksanaan dan Peranan Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.*
- Azahari, Azril (1991). *Pendidikan dan Latihan Pertanian : Suatu upaya peningkatan Kualitas dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.*
- Azahari, Azril (1998). *Pendidikan Tinggi untuk Antisipasi Tahun 2020 : Di Persimpangan Jalan. Jakarta.*
- Biro Pusat Statistik (1994). *"Indeks Pembangunan Manusia Perbandingan Antar Propinsi 1990 - 1993.*
- Biro Pusat Statistik (1997). *"Ringkasan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 1996".*
- Gilley, J.W. and S.A.Eggland (1996). *"Principle of Human Resources Development". New York: Addison Wesley.*
- Hasil Lokakarya Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Redecon (1991).*
- Macharany, A.A (1990). *Tinjauan Antisiapatif Tentang Bagaimana Ikhtiar Ke Depan Peningkatan Kualitas Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.*
- Mat, Johari (1997). *Globalization, Higher Education and the Role of the Private Sector : Malaysia's Response Toward 2020. Malaysia.*
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *"Perencanaan Pembangunan dalam Penanggulangan Kemiskinan. Prisma Nomor Khusus 25 tahun.*
- Syarif Hidayat dan Boediono. 1996. *"Pembangunan Sumberdaya Manusia; Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun". Prisma Nomor Khusus.*

Thomas, John W (1997). *Globalization : Policy Choices and Policy Options for Developing Countries. The Harvard Institute for International Development, Harvard University.*

UNDP. 1997. "*Human Development Report*". Oxford University Press. Widodo, Y.B. dan Daliyo. "*Laporan Pengembangan Manusia Nusa Tenggara Barat 1980-1995*". Jakarta: PPT-LIPI World Development Bank. 1997. "*World Development Indicator 1997*".